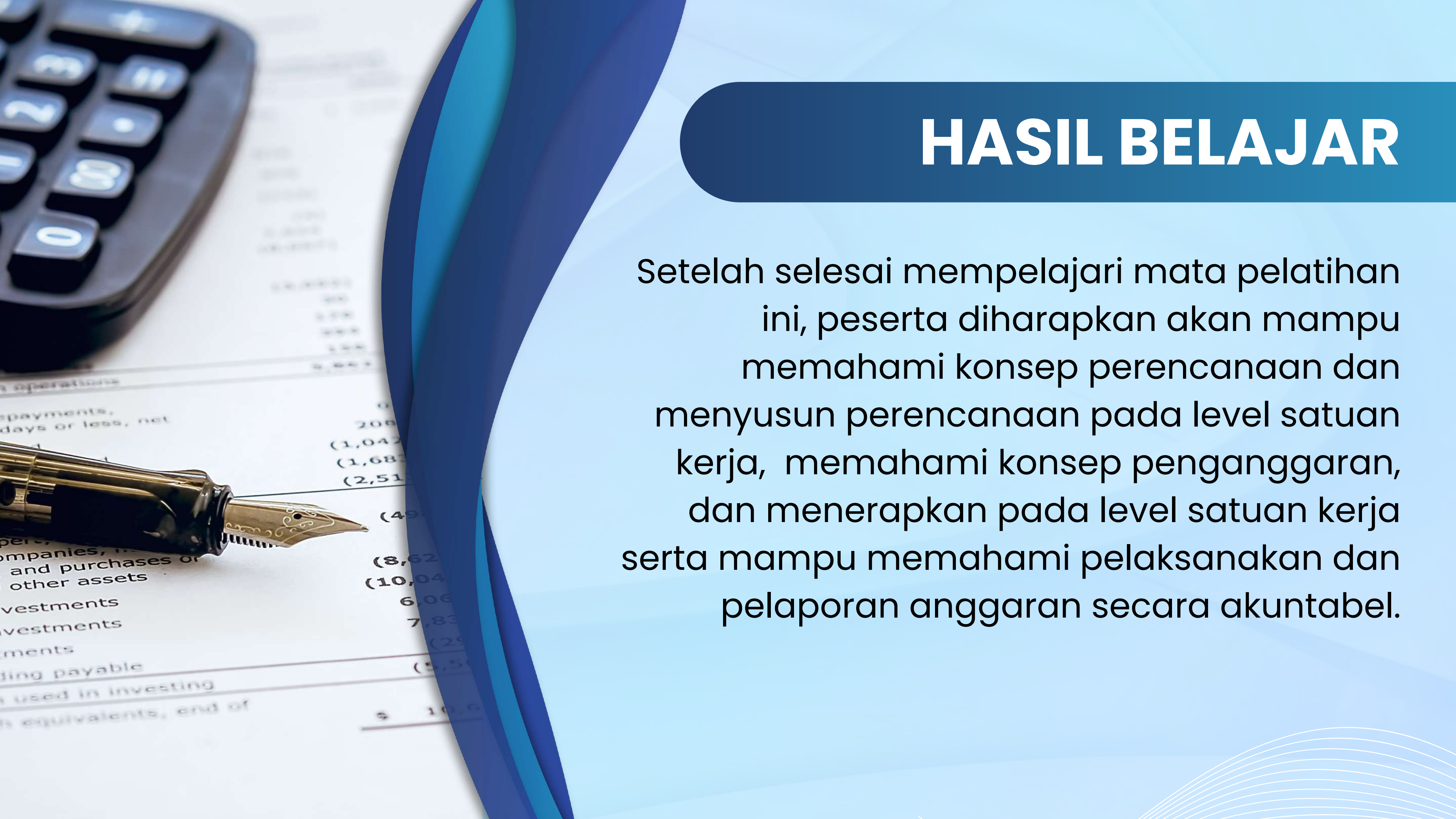


DESKRIPSI SINGKAT

Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan terkait dengan pemahaman pentingnya perencanaan yang akurat dalam sebuah organisasi pemerintahan, penganggaran yang efektif dan efisien dalam mendanai kegiatan, melaksanakan anggaran dengan akuntabel dan mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola baik secara administrasi maupun substansi.



The background of the slide features a blurred image of a financial document, likely a cash flow statement, with a calculator and a fountain pen resting on it. The document contains various line items and numerical values, some in parentheses indicating negative amounts. A large, stylized blue wave graphic curves across the left side of the slide, separating the background image from the text area.

HASIL BELAJAR

Setelah selesai mempelajari mata pelatihan ini, peserta diharapkan akan mampu memahami konsep perencanaan dan menyusun perencanaan pada level satuan kerja, memahami konsep penganggaran, dan menerapkan pada level satuan kerja serta mampu memahami melaksanakan dan pelaporan anggaran secara akuntabel.

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelah selesai mengikuti mata pelatihan ini peserta diharapkan akan dapat:

1. Menjelaskan konsep dan kebijakan Perencanaan;
2. Menguraikan konsep dan kebijakan Penganggaran;
3. Menjelaskan manajemen anggaran tingkat nasional;
4. Mengidentifikasi manajemen anggaran tingkat K/L;
5. Menjelaskan manajemen pelaksanaan anggaran;
6. Menguraikan manajemen perencanaan dan penganggaran daerah.



Materi Pokok

1. Konsep dan Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

2. Manajemen Anggaran Tingkat Nasional (Kebijakan Fiskal dan Penyusunan APBN)

3. Manajemen Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga

4. Pelaksanaan Anggaran Negara

5. Pelaporan Keuangan dan Kinerja, serta Kerugian Negara

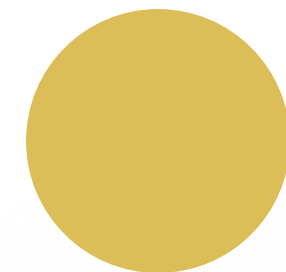
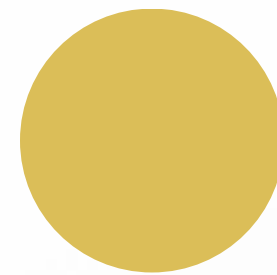
Agenda Pembelajaran

- Pendahuluan
- Konsep Dan Kebijakan
Perencanaan Dan Penganggaran
- Manajemen Anggaran Tingkat
Nasional (Kebijakan Fiskal dan
Penyusunan APBN)
- Manajemen Anggaran Tingkat
Kementerian/Lembaga
- Pelaksanaan Anggaran Negara
- Pelaporan Keuangan dan Kinerja,
serta Kerugian Negara



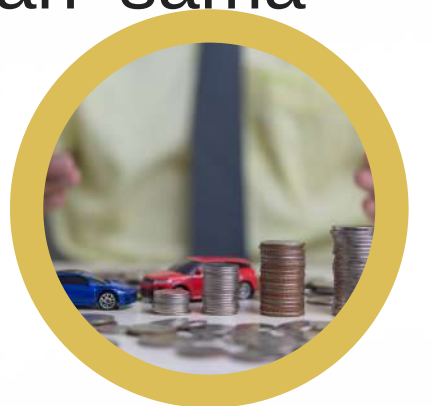


PENDAHULUAN



Mengapa Indonesia dan Korea Selatan Berbeda

- Korsel dan Indonesia sama-sama memiliki perencanaan ekonomi 5 tahunan.
- Sama-sama memulai dengan industri berat (baja).
- Sama-sama negara birokrasi (bureaucratic state)
- 1973 Indonesia tertolong oleh krisis OPEC, Korsel menderita karena krisis.
- Sama-sama terkena krisis 1997 (dan sama-sama menerima bantuan IMF).



KONDISI JAKARTA TAHUN 1960



KONDISI JAKARTA 2023



FAKHRI FADLURROHMAN

Deretan rumah semipermanen di bantaran Kali Ciliwung, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2023).

KONDISI INDONESIA

Sampai Siang Beras Murah Tak Datang, Warga Pulang dengan Kecewa



Fakta Hukum 1 Min Baca
Februari 21, 2024



16 Provinsi di RI Masuk Kategori Miskin Tahun Depan

tim | [CNN Indonesia](#)

Senin, 05 Jun 2023 18:25 WIB



Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024 mendatang, termasuk Jawa Tengah dan Lampung. (ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

KONDISI SEOUL TAHUN 1960



KONDISI SEOUL 2022



KONDISI KOREA SELATAN



Wikipedia Sungai Cheonggyecheon menyediakan ruang terbuka bagi warga kota Seoul, Korea Selatan.

MENGAPA PERBEDAAN TERSEBUT TERJADI?





KONSEP DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



KONSEP DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Konsep Perencanaan
2. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran
3. Konsep Penganggaran
4. Pendekatan Penganggaran





KONSEP PERENCANAAN



Konsep Perencanaan

- Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
- Selain adanya keterkaitan antara pusat dan daerah sistem perencanaan juga harus terkait erat antara berbagai level organisasi baik itu unit eselon I, II dan III.



8 Dokumen Perencanaan

01

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) – 20 tahun

02

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) – 5 tahun

03

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) – 5 tahun

04

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) – 5 tahun



8 Dokumen Perencanaan

05

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (Rencana Kerja Pemerintah – RKP) – 1 tahun

06

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah – RKPD) – 1 tahun

07

Rencana Pembangunan Tahunan K/L (Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga – Renja-KL) – 1 tahun

08

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah – Renja-SKPD) – 1 tahun



13 Istilah/Konsep dalam Perencanaan

Visi

Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan



Kebijakan

Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.

Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

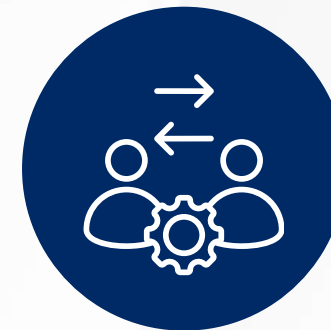


Program

Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau ke masyarakat yg dikoordinasikan oleh pemerintah

Strategi

Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi



Program K/L/SKPD

Sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

13 Istilah/Konsep dalam Perencanaan

Program Lintas K/L/SKPD

Sekumpulan rencana kerja beberapa K/L/SKPD



Sasaran

Menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

Sekumpulan rencana kerja terpadu antar-K/L/SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau Kawasan



Kegiatan

Serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan output dan hasil yang penting untuk pencapaian program

Musrenbang

Forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah



Kinerja/Output

Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur

Tujuan

Merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tergambar dlm (RPJMN) yang menunjukkan tahapan yg hrs dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan



Dasar Penyusunan Anggaran Berdasarkan Kinerja

01

Fungsi

02

Program

03

Kegiatan

04

Jenis Belanja

05

Kinerja (Output dan Outcome)





KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

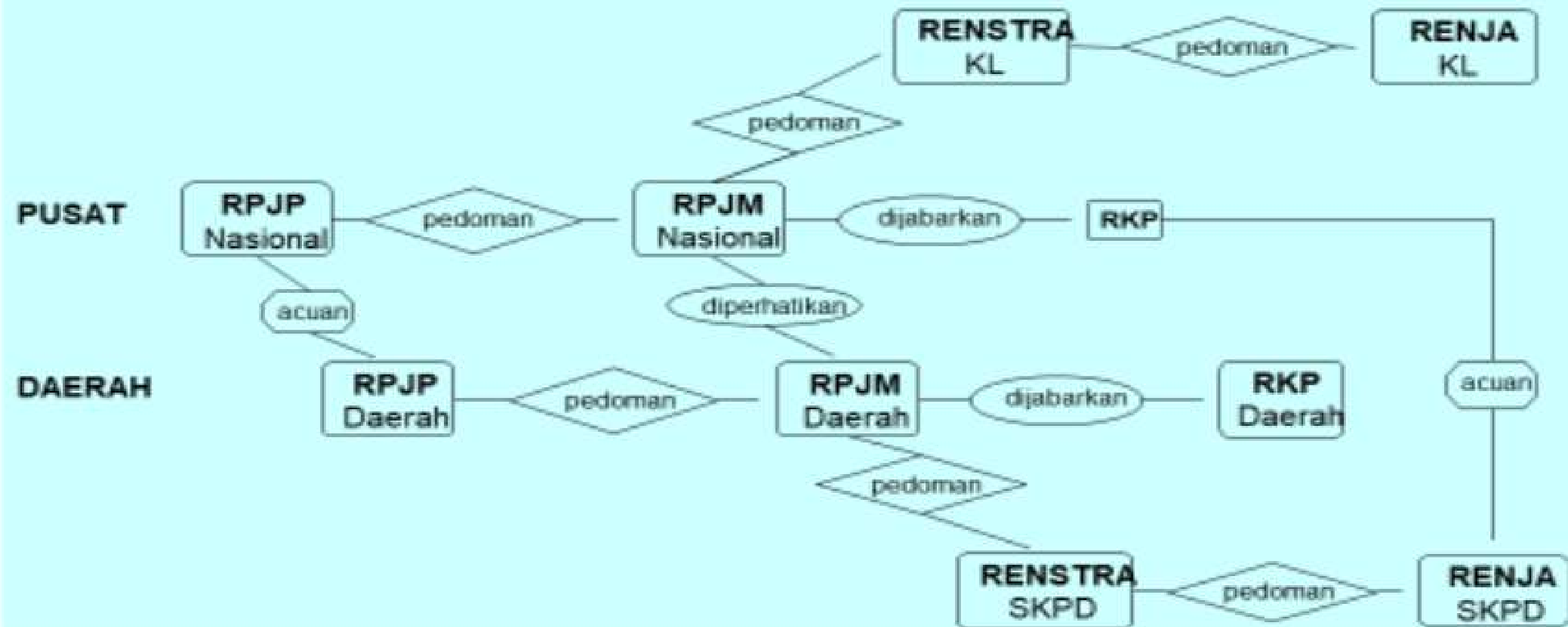
Sebuah rencana yang baik membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup agar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tujuan tercapai.

Presiden selaku Kepala Pemerintahan bertanggung jawab atas pencapaian rencana nasional memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara, menguasai kepada:

- Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang K/L yang dipimpinnya;
- Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.



**HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DENGAN RENCANA KERJA KL DAN RENCANA KERJA SKPD
(UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)**



Logic Model sebagai Pendekatan dalam Penyusunan Perencanaan

- Suatu metoda visual dalam menyajikan ide dan sebuah cara untuk mendeskripsikan dan membagi pemahaman mengenai hubungan antar elemen yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu program (Knowlton dan Philips, 2013).
- Tujuan dari logic model adalah memberikan gambaran lengkap kepada stakeholder dengan sebuah road map yang menguraikan keterkaitan langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan agar program yang telah direncanakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.



Gambar Logic Model

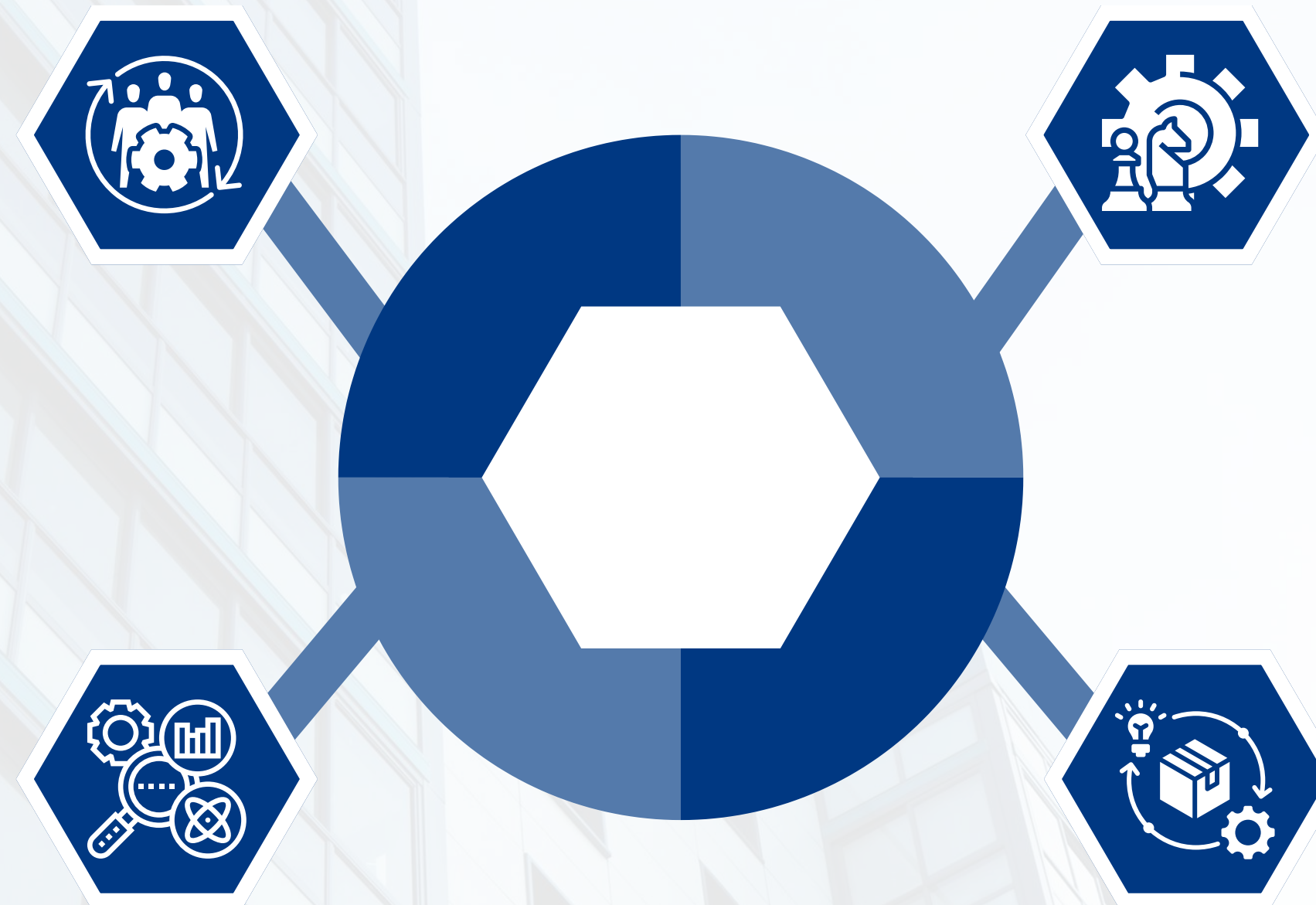
Siklus Manajemen Kinerja

1. Penetapan Visi

Sumber daya yang dimiliki organisasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan dinilai, kemudian ditentukan ekspektasi outcome yang sesuai.

2. Implementasi

Strategi organisasi dijalankan dengan cara merencanakan apa yg seharusnya dilakukan oleh organisasi mulai dari menyusun program/kegiatan s.d. evaluasi, mempengaruhi orang dan melakukan pengendalian



3. Pengukuran

Kinerja organisasi dinilai dengan cara mengukur output dan outcome berdasarkan indikator pengukuran yang telah ditetapkan sebelumnya

4. Pembelajaran

Informasi pengukuran dan evaluasi kinerja digunakan dalam mengambil keputusan dan mengidentifikasi apakah perlu melakukan penyesuaian program atau perlu melakukan perubahan renstra

Kriteria dan Hirarkhi Kinerja dalam Penganggaran

Efektivitas Kebijakan (Target Outcome)

Sebuah kebijakan dinyatakan berhasil apabila setelah dalam kurun waktu tertentu kondisi yang ingin diciptakan dari adanya kebijakan tersebut dapat terwujud.



Kinerja Operasional (Target Output)

Pada level yang lebih rendah kinerja organisasi ditunjukkan oleh output yang dihasilkan oleh satuan kerja tersebut

Manajemen kinerja diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang menjadi tanggung jawab unit di bawah Kementerian/ Lembaga berdasarkan: 1) efisiensi operasional, 2) output dan kualitas manajemen, dan 3) manajemen sumber daya manusia.



KONSEP PENGANGGARAN



Reformasi Penganggaran

- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara



Penganggaran

- Penganggaran pada prinsipnya adalah bagaimana menyediakan anggaran yang cukup bagi sebuah rencana secara efektif dan efisien sehingga rencana dapat terwujud.
- Apabila terjadi kondisi di mana anggaran yang terbatas maka rencana yang dikerjakan dipilih yang prioritas, apabila konsep ini diterapkan sedikit demi sedikit rencana nasional yang hendak dicapai akan dapat terwujud.



3 Prinsip Utama Pengelolaan Keuangan Publik yang Baik



Kerangka kebijakan fiskal jangka menengah (Medium Term Fiscal Framework) yang dilaksanakan secara konsisten (aggregate fiscal discipline)

Efisiensi Alokasi (allocative efficiency), yaitu prinsip memastikan anggaran dialokasikan pada prioritas dan mencapai manfaat yang terbesar dari ketersediaan dana yang terbatas

Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (technical and operational efficiency)

Perjalanan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Penganggaran yang Kurang Optimal



ECONOMY

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. Rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif);
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dan Manfaat Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

- ✓ Perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel
- ✓ Penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja
- ✓ Peningkatan informasi kinerja pada dokumen anggaran
- ✓ Mengurangi kebutuhan fasilitas tagging
- ✓ Hubungan logika aktivitas (output-outcome) dapat tergambar dengan lebih jelas

Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program

Tidak adanya overlapping kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi

Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik

Secara makro akan terlihat keselarasan visi, misi Presiden dengan fokus pembangunan

Rumusan nomenklatur program, outcome, kegiatan, output mencerminkan "real work"

7 Prinsip dalam Pelaksanaan RSPP

Program

Policy tool yang dirumuskan oleh Kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Eselon I. Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada fungsi-fungsi utama dari Kementerian.

Outcome

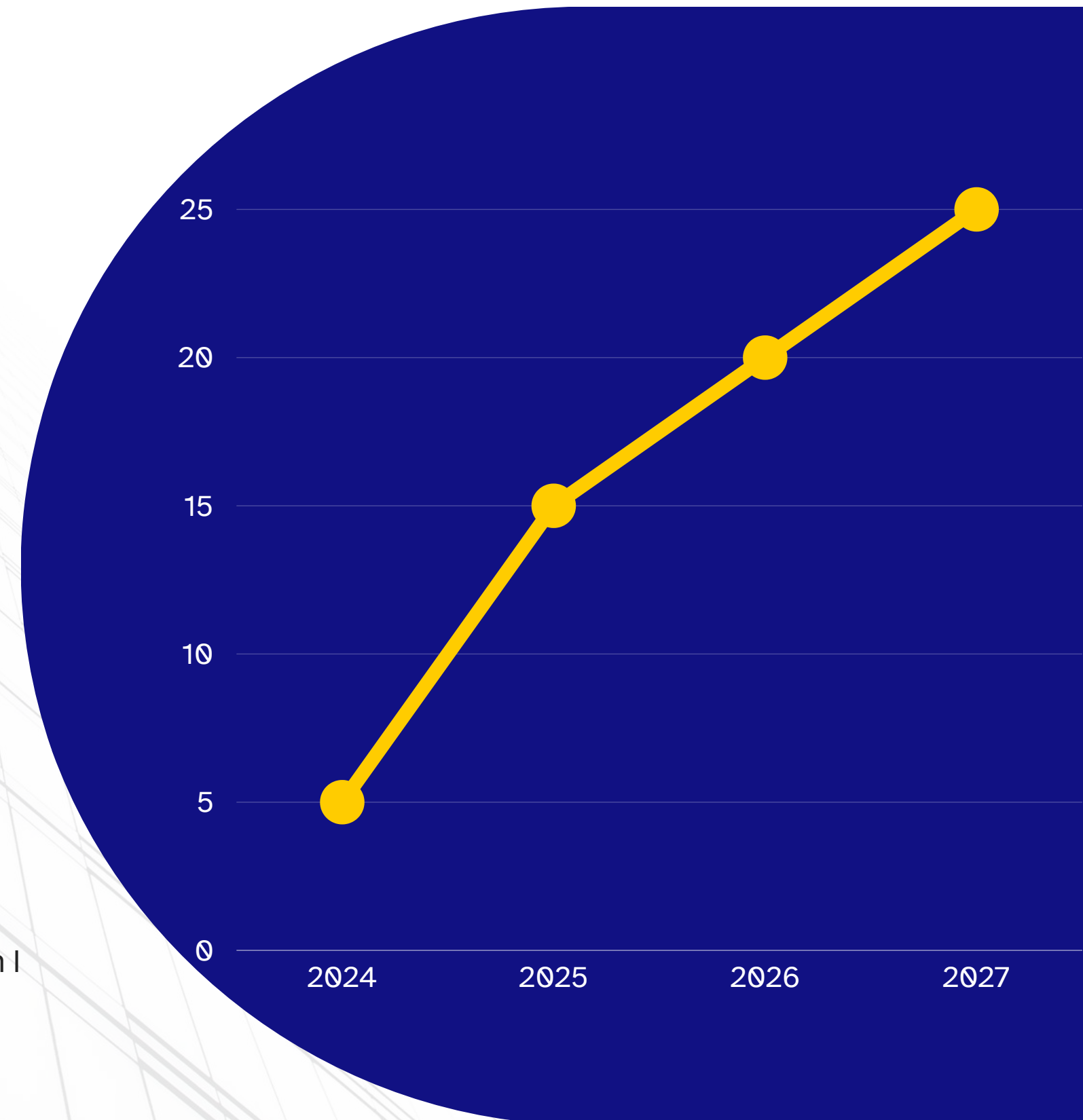
Sasaran merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit Eselon I atas program terkait. Sebagai ukuran keberhasilan, outcome dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja

Output

Merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya outcome. Output dilengkapi dengan indikator dan target kinerja

Kegiatan

Merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit eselon I untuk menghasilkan output



7 Prinsip dalam Pelaksanaan RSPP

KRO

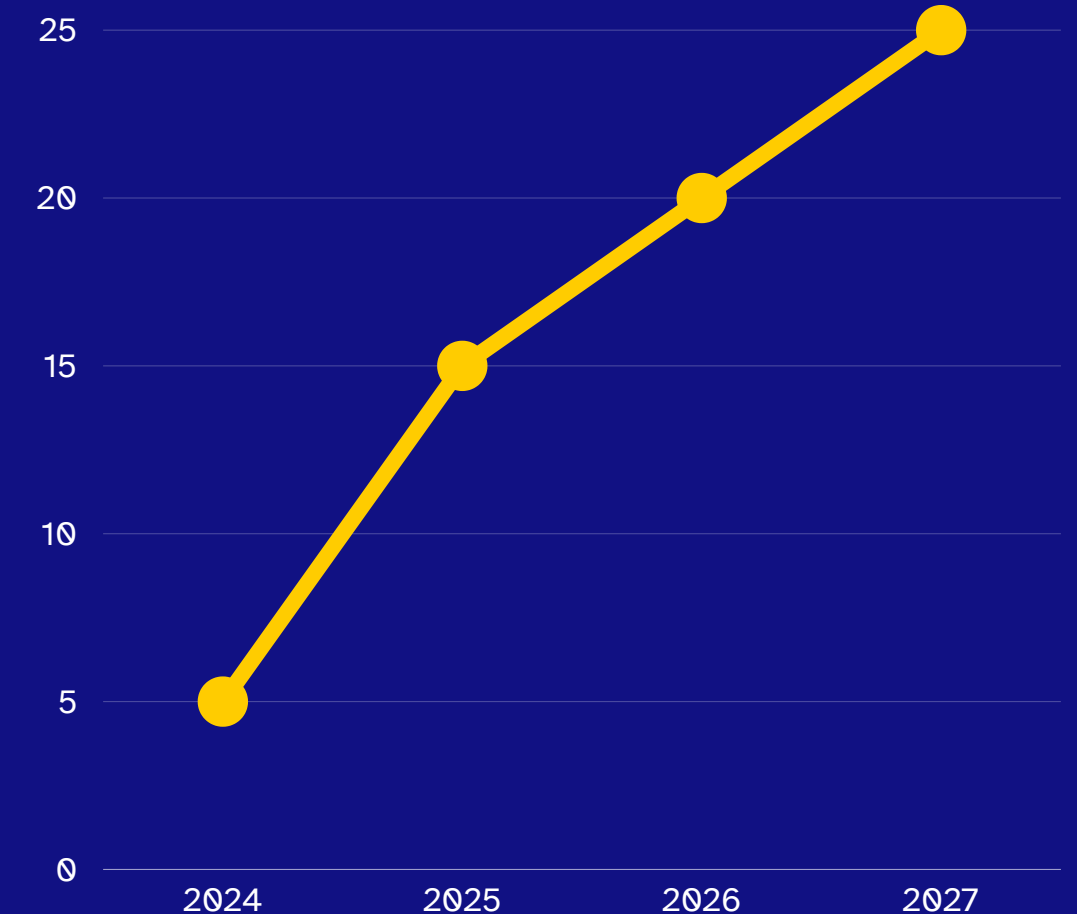
Klasifikasi Rincian Output adalah kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan.

Rincian Output

Produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan.

Komponen, Sub Komponen, Header, Akun, dan Detail Belanja

- Komponen: unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian output yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian output.
- Subkomponen (bersifat opsional): sub unsur, sub bagian, atau sub tahapan dari suatu komponen.
- Header (bersifat opsional): pengelompokan detil belanja yang dilaksanakan oleh unit/satker K/L.
- Akun: kode-kode atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi.
- Detil belanja: informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya, dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian RO.



Pendekatan Penganggaran - Anggaran Terpadu (Unified Budgeting)

- Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan penerapan pendekatan penganggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM.
- Anggaran terpadu terutama ditujukan agar tidak terdapat duplikasi penganggaran dalam berbagai level organisasi di Indonesia baik di level pusat maupun satker di daerah.
- Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L



Langkah-langkah Pelaksanaan Anggaran Terpadu

1

**Penyatuan anggaran rutin
dengan anggaran pembangunan**

Agar tidak terjadi duplikasi dalam
pendanaan

2

**Restrukturisasi program dan
kegiatan**

Tidak terjadi tumpang tindih
pekerjaan. Satu unit eselon I
mengerjakan 1 program shg setiap
program yang hendak dikerjakan
pemerintah jelas siapa
penanggung jawab dan
pengalokasian dananya

3

**Program lintas eselon I atau
Kementerian**

Namun harus dapat jelas
menggambarkan msg2 tanggung
jawab unit organisasi sehingga
tetap dapat dirunut penanggung
jawab dari msg2 aktivitas dan
keterkaitan antar aktivitas
pengelola program lintas

Prinsip Penerapan Anggaran Terpadu

1. Prinsip Akuntabilitas Kinerja Kabinet (Perencanaan Kebijakan/Policy Planning)
2. Prinsip Akuntabilitas Kinerja Organisasi (struktur organisasi dan struktur anggaran)



Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

KPJM adalah untuk memastikan sebuah kebijakan yang telah dipilih akan disediakan pendanaannya sampai kebijakan tersebut terwujud, atau sebuah kebijakan yang telah dikerjakan maka akan dipastikan kebutuhan pendanaan terkait dengan kebijakan tersebut akan tersedia anggarannya.



Kerangka Konseptual KPJM

Rolling Budget

Sistem penganggaran bergulir (rolling budget) merupakan penganggaran yang memperhatikan alokasi anggaran tahun sebelumnya (historical budgetary allocations)



Parameter (Assumption)

- Adalah nilai2 yg digunakan sbg acuan. Nilai-nilai tersebut dpt berupa keterangan atau informasi yg dpt menjelaskan batas2 atau bagian2 ttt dari suatu sistem.
- Agar dpt menerapkan KPJM secara efektif mk perlu dilakukan identifikasi thd parameter2 yg mempengaruhi proyeksi penghitungan pendanaan pd masa yad (parameter ekonomi atau parameter non-ekonomi).

Angka Dasar (Baseline) dan Penyesuaian Baseline

Angka dasar (baseline) merupakan jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan pada saat tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan.



Mekanisme penyesuaian baseline (baseline adjustment)

Penyesuaian terhadap angka dasar (baseline) sangat diperlukan bagi kesinambungan implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme pengajuan usulan anggaran bg kbjk baru (new initiative)

Usulan anggaran bagi kebijakan baru diajukan setelah diketahui terdapat sisa ruang fiskal (fiscal space) berdasarkan penghitungan terhadap proyeksi sumber daya anggaran yang tersedia (resources availability) dikurangi dengan angka dasar (baseline) anggaran bagi implementasi kebutuhan dasar, pelayanan birokrasi/publik dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dan hasil evaluasi yang menetapkan sebuah kebijakan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya

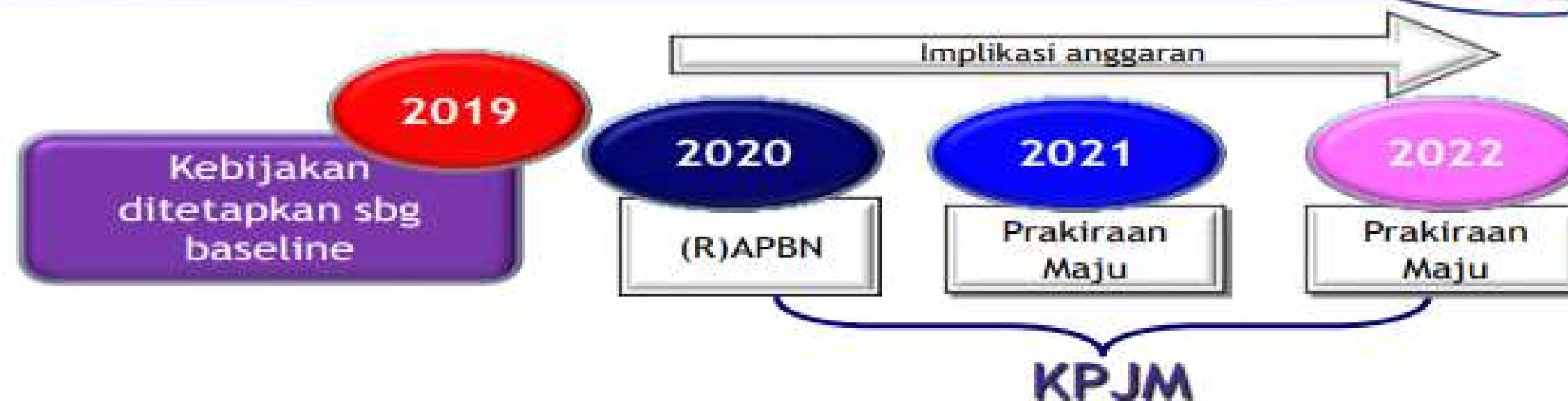




Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja

Rolling Budget



TA 2019 dan KPJM 2021 - 2022



TA 2020 dan KPJM
2021 - 2023





PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

- Penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- Penyusunan anggaran tersebut, mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja.
- Penerapan PBK akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.
- Pendekatan PBK berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (outputs) dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan



@

@

TUJUAN PBK



Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan



Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran sesuai dengan Renstra dan/atau tugas dan fungsi K/L



PRINSIP-PRINSIP PBK.

1 OUTPUT & OUTCOME ORIENTED

- Alokasi anggaran dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien.
- Program /kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.

2 FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN (LETS THE MANAGER MANAGES)

- Keleluasaan meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan

3 MONEY FOLLOW FUNCTION, FUNCTION FOLLOWED BY STRUCTURE

- Menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya.
- Dikaitkan dengan prinsip function followed by Structure, yaitu suatu prinsip yang menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban



3 KOMPONEN PENYUSUNAN PBK

1 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan (KPI/IKU). indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IKU kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan indikator keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan bawah kegiatan).

2 STANDAR BIAYA

Besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus (SBU & SBK)

3 EVALUASI KINERJA

Proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program atau kegiatan.



BUTIR PEMIKIRAN PENGEMBANGAN STANDAR BIAYA DALAM Mendukung PENERAPAN PBK



1

Standar biaya merupakan alat bantu untuk menyusun anggaran



2

Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran yang paling efisien untuk menghasilkan keluaran. Bisa berubah jika parameternya berubah (inflasi, force majeure,



3

Standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh K/L (standar pelayanan minimal).



PENERAPAN PBK DI LEVEL NASIONAL

PERAN PEJABAT ADMINISTRATOR DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Mengidentifikasi rencana organisasi dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut



Memastikan keselarasan tujuan organisasi yang dipimpin telah sesuai dengan tujuan Kementerian/Lembaga dan tujuan nasional



Berinovasi untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien



Mampu menganalisis permasalahan/kendala yang dihadapi organisasi dalam pencapaian tujuan secara keseluruhan dan mencari solusi/perbaikan



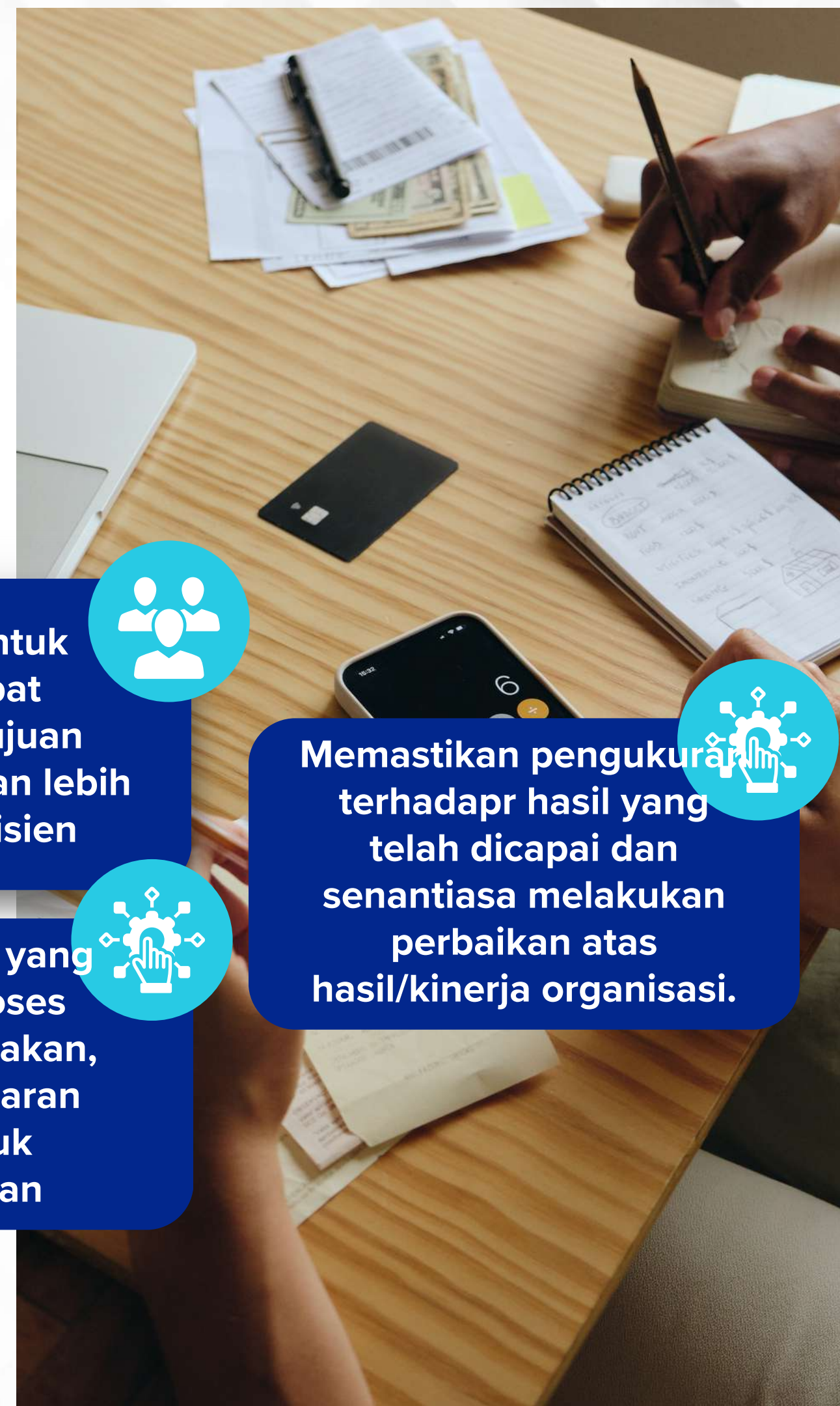
Membuat usulan perencanaan bagi organisasi yang dipimpinnya



Memahami input yang dibutuhkan, proses yang harus dikerjakan, kebutuhan anggaran dan SDM untuk mencapai tujuan



Memastikan pengukuran terhadap hasil yang telah dicapai dan senantiasa melakukan perbaikan atas hasil/kinerja organisasi.





MANAJEMEN ANGGARAN TINGKAT NASIONAL (KEBIJAKAN FISKAL PENYUSUNAN APBN)



MANAJEMEN ANGGARAN TINGKAT NASIONAL (KEBIJAKAN FISKAL PENYUSUNAN APBN)

KEBIJAKAN FISKAL

- Salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah (Menkeu) - UU No. 17 Tahun 2003.
- Pengelolaan anggaran pemerintah untuk mempengaruhi suatu perekonomian, termasuk kebijakan perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, pembelian barang-barang dan jasa-jasa oleh pemerintah, serta ukuran defisit dan pembiayaan anggaran, yang mencakup semua level pemerintahan

ASUMSI DASAR APBN DAN EKONOMI MAKRO

- Besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai langkah awal untuk menghitung besaran APBN sudah mempertimbangkan rencana kebijakan fiskal yang akan diambil pemerintah

PENYUSUNAN APBN

- Siklus APBN
- Format dan Struktur APBN
- Revisi APBN





KEBIJAKAN FISKAL



TUJUAN SPESIFIK KEBIJAKAN FISKAL



**KOREKSI ATAS
KETIDAKSEIMBANGAN
SEMENTARA**



**STIMULASI
TERHADAP
PERTUMBUHAN
EKONOMI**



**REDISTRIBUSI
PENDAPATAN**

FUNGSI KEBIJAKAN FISKAL

ALOKASI

Pemerintah melakukan intervensi terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya untuk mendorong berbagai aktivitas yang satu atau menghambat aktivitas lainnya,

DISTRIBUSI

Bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat didistribusikan diantara anggota-anggotanya.
Meminimalisir volatilitas atau fluktuasi siklus bisnis.
memelihara tingkat pendapatan nasional aktual mendekati potensialnya.

STABILISASI

Pemerintah menjamin perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil



KEBIJAKAN FISKAL

**Sebagai stabilisator
perekonomian/kontra
siklis (countercyclical)**

Ekonomi Boom

Pada saat ekonomi sedang dalam masa boom, pemerintah dapat menjalankan Surplus Anggaran

Resesi Ekonomi

Pemerintah dapat melakukan ekspansi fiskal melalui stimulus fiskal, dengan menjalankan Anggaran Defisit

Secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, dalam satu periode siklus anggaran jangka menengah, APBN mengarah menjadi Berimbang

CIRI-CIRI APBN (SEBAGAI ALAT KEBIJAKAN FISKAL) SEHAT

1

Defisit yang terkendali menuju seimbang atau surplus

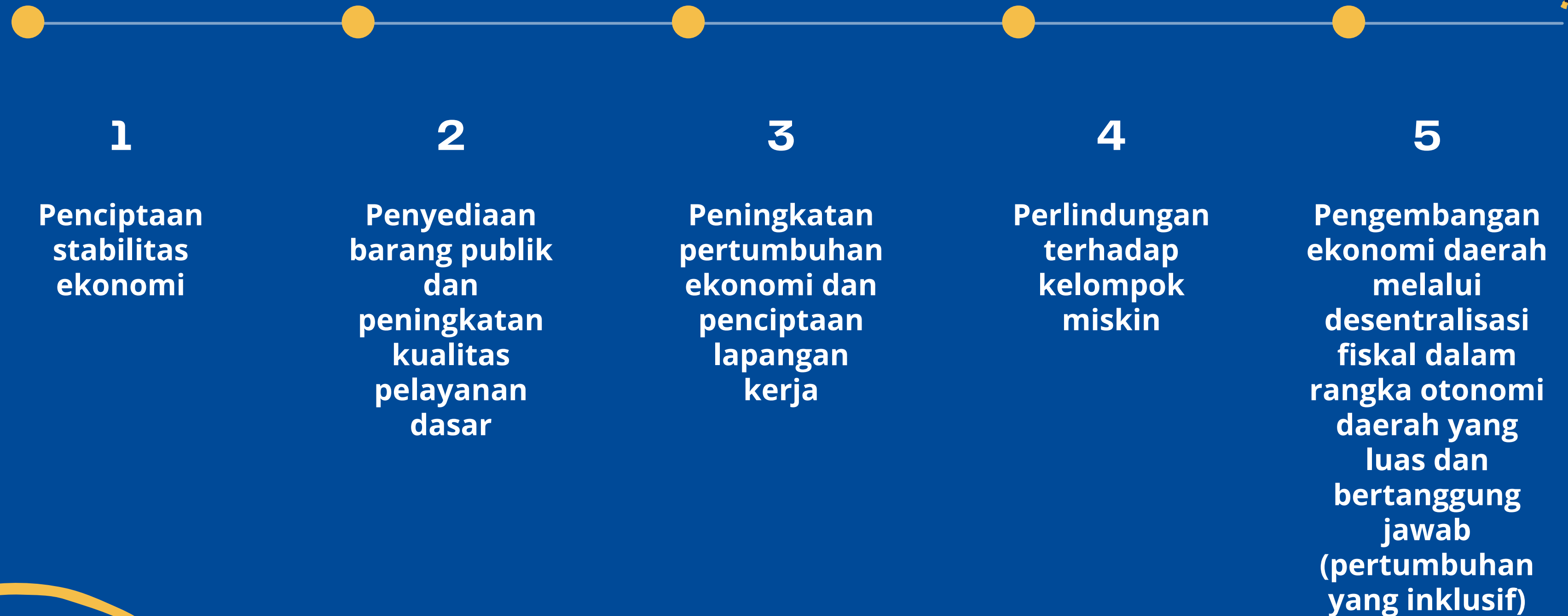
2

Keseimbangan primer terjaga positif

3

Rasio yang cenderung menurun (benchmark defisit APBN sebesar 3 % dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimal 60%)

APBN (Instrumen Fiskal Utama) utk Mencapai Kemakmuran Rakyat, melalui



ASUMSI DASAR APBN & EKONOMI MAKRO

Badan Kebijakan Fiskal (Kemenkeu) selaku lembaga penyusun kerangka ekonomi makro berdiskusi dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Negara PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Menko Perekonomian, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan BP Migas untuk meningkatkan kredibilitas kerangka ekonomi makro yang dihasilkannya.

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DALAM MENYUSUN APBN

- Pertumbuhan ekonomi
- Tingkat inflasi
- Nilai tukar rupiah
- Suku bunga SPN 3 bulan
- Harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP)
- Lifting Minyak Bumi Indonesia (dasar perhitungan penerimaan PNBP migas)



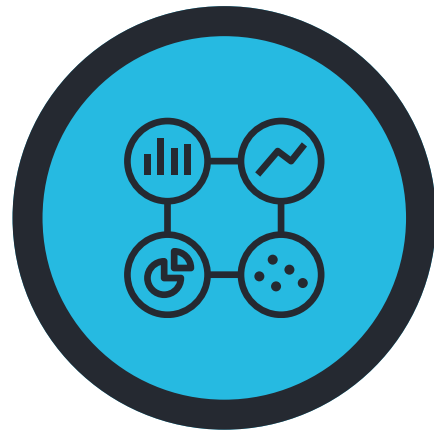


PENYUSUNAN APBN





Komponen/Struktur APBN



PENERIMAAN/ PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah



BELANJA NEGARA

Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja



KESEIMBANGAN PRIMER

pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara (tanpa bunga hutang)



SURPLUS/ DEFISIT

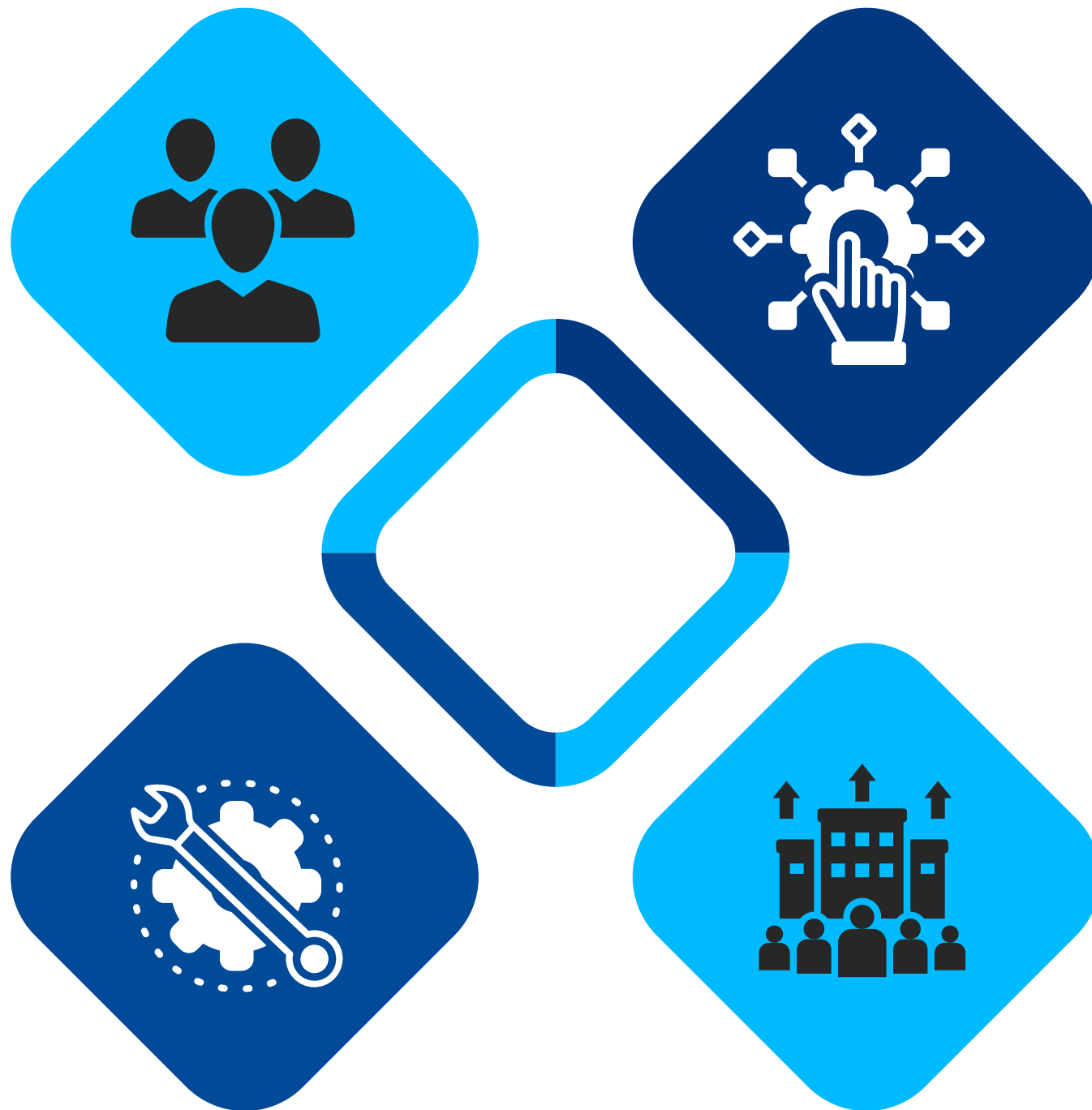
Pendapatan negara dikurangi total belanja negara



PEMBIAYAAN ANGGARAN

Penerimaan atau pengeluaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dalam APBN (tidak merubah kekayaan bersih negara)

Faktor yang Mempengaruhi Revisi APBN



- ✓ Adanya perubahan asumsi dasar penyusunan APBN yang terjadi selama tahun anggaran berjalan
- ✓ Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal
- ✓ Adanya kebutuhan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari
- ✓ Adanya target penerimaan yang tidak tercapai, sehingga perlu penyesuaian pengeluaran atau pembiayaan APBN

Peran Pejabat Administrator

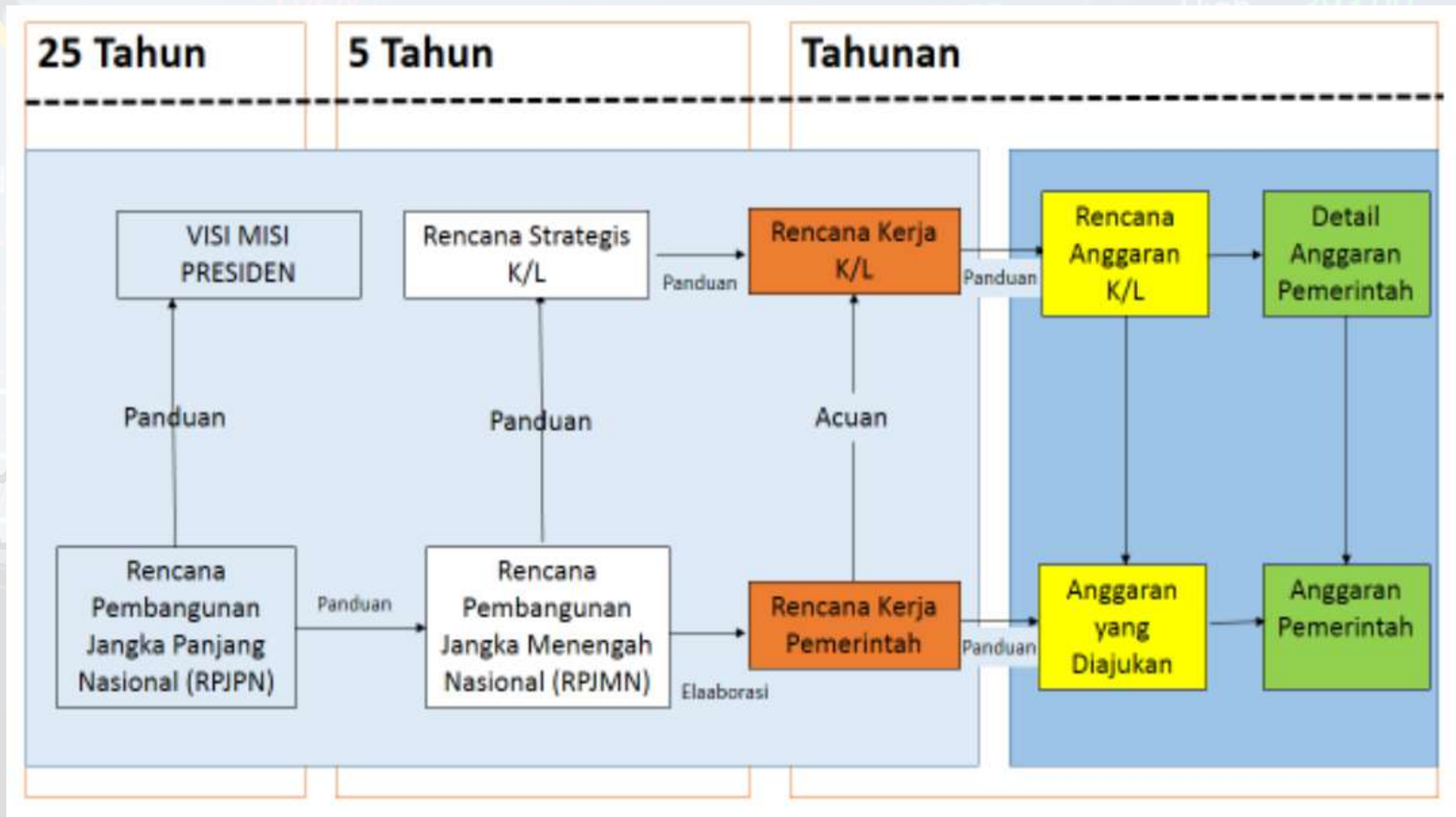
1. Memahami APBN pada setiap tahun anggaran
2. Memahami arah kebijakan pemerintah, kondisi keuangan negara secara makro, sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai pemerintah
3. Merumuskan peran organisasi yang dipimpinnya selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan APBN tahun tersebut





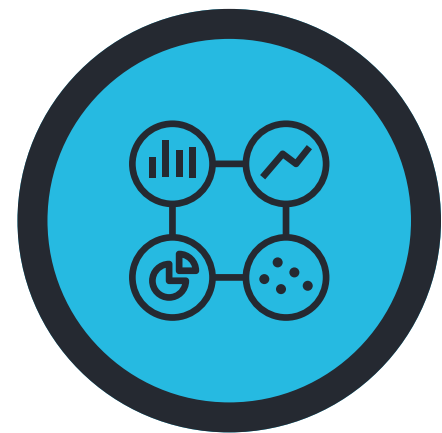
MANAJEMEN ANGGARAN TINGKAT K/L





Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah

11 Tahapan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional



**Penyusunan
Tema, Sasaran,
Arah
Kebijakan, dan
Prioritas
Pembangunan**



**Tinjau ulang
(reviu) angka
dasar
kementerian/
lembaga**



**Penyusunan
kerangka
ekonomi
makro dan
pokok pokok
kebijakan
fiskal serta
ketersediaan
anggaran**



**Penyiapan
rancangan
awal RKP**



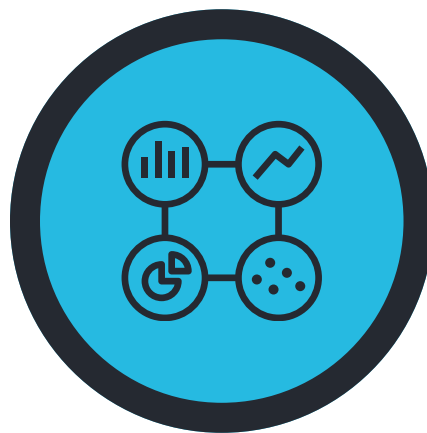
**Penyusunan
pagu indikatif**



**Koordinasi
penyusunan
rancangan
awal RKP**

(PP No. 17/2017 Pasal 6)

11 Tahapan Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional



**Penetapan
rancangan
awal RKP dan
pagu indikatif
kementerian/
lembaga**



**Penyusunan
Renja K/L**



**Pembahasan
rancangan
RKP, kerangka
ekonomi
makro, dan
pokok-pokok
kebijakan
fiskal dalam
pembicaraan
pendahuluan**



**Penetapan
RKP dan pagu
anggaran
kementerian/
lembaga**



**Penyusunan
dan
penelaahan
RKA-K/L**

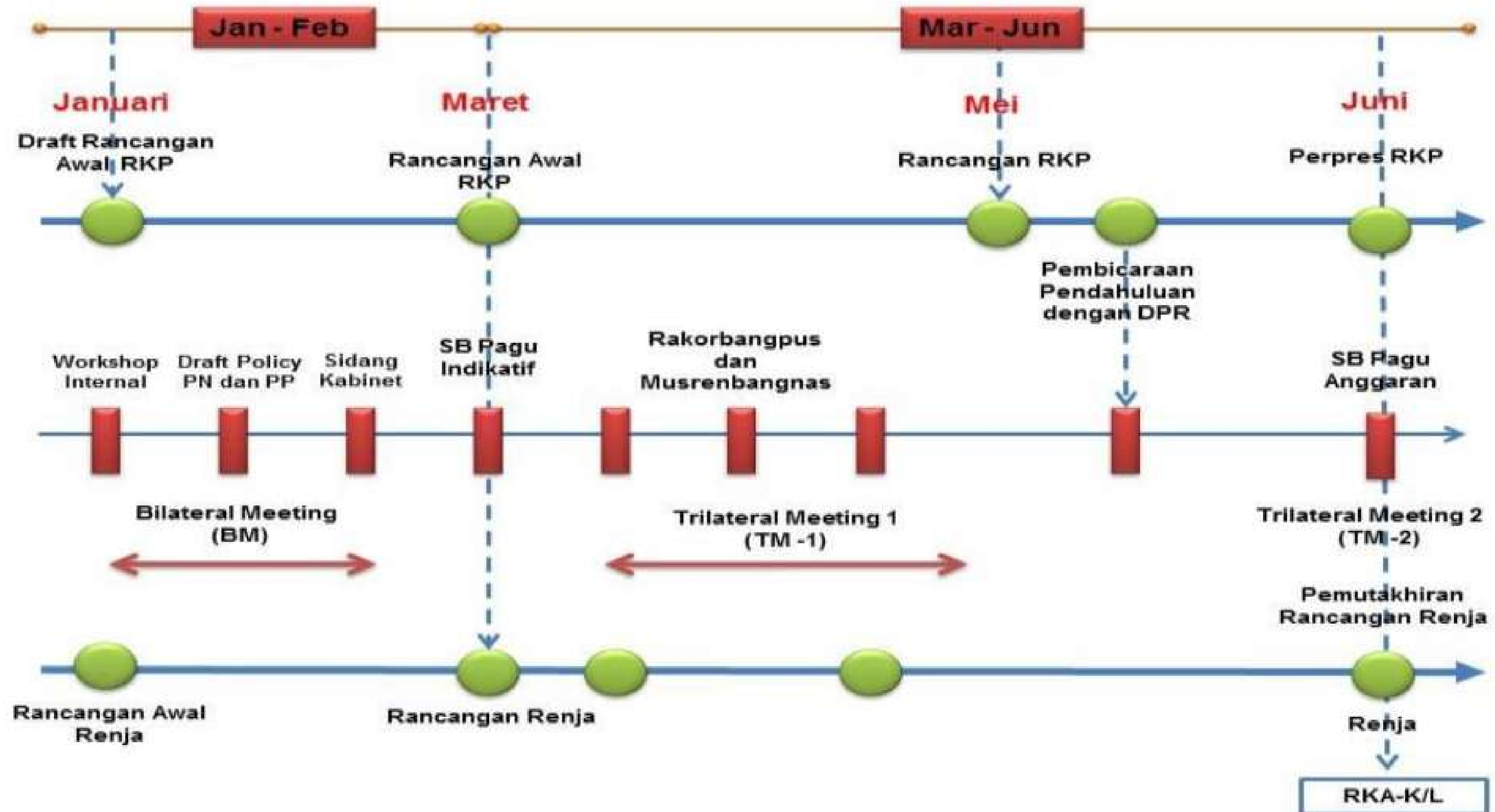
(PP No. 17/2017 Pasal 6)



TATA CARA PENYUSUNAN RENJA K/L



Mekanisme Penyusunan Renja K/L



Tugas dan Tanggung Jawab Penyusunan Renja dan RKA K/L

No.	PIHAK YANG TERLIBAT	TUGAS & TANGGUNG JAWAB
1.	Kepala Biro Perencanaan K/L	- Bertanggung jawab penuh serta memastikan Renja K/L yang dikirimkan (submit) adalah benar (valid); - Melakukan submit Renja K/L dalam sistem informasi Krisna; dan Menugaskan 1 (satu) orang staf Biro Perencanaan K/L sebagai admin.
2.	Admin Biro Perencanaan K/L	- Membuat user tambahan bagi unit kerja terkait dan menjamin keamanan penggunaannya; dan - Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi bagi penyusunan Renja K/L.
3.	Staf Biro Perencanaan K/L	Melakukan input dan mengubah data seluruh unit kerja Renja K/L.
4-	User Kementerian/ Lembaga	Melakukan input data Renja K/L untuk setiap unit kerja (Eselon I dan Eselon III) yang menjadi tanggung jawabnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Penyusunan Renja dan RKA K/L

No.	PIHAK YANG TERLIBAT	TUGAS & TANGGUNG JAWAB
5	Direktorat di Kementerian PPN/ Bappenas yg menjadi Mitra K/L	- Melakukan penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirimkan (submit) oleh K/L yang menjadi mitra kerjanya sesuai hasil koordinasi - Melakukan validasi (Approve/Reject/No Action) terhadap Renja K/L yang telah di telaah dalam Sistem Informasi KRISNA; dan Melakukan usulan (request) untuk membuka Sistem Informasi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
6	Direktorat Anggaran-DJA, Kemenkeu yang menjadi Mitra K/L	- Memastikan Renja K/L yang dikirimkan direktorat mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas telah lengkap, sebelum dikirimkan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L; b. - Mengkoordinasikan keseluruhan proses penyusunan, penyesuaian, dan revisi terkait sistem informasi Renja K/L; dan - Membuka atau mengunci sistem informasi sesuai dengan kewenangan.
7	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas	
8	Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/ Bappenas	

Sumber: Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu (diolah)

Penyediaan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Tujuan



Penetapan Pagu Indikatif



Renja K/L dan Rancangan Awal RKP



Penyusunan Pagu Anggaran



Penyesuaian Alokasi Anggaran





Penetapan Pagu Indikatif



Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara

